



Purbaya Dorong Media Lantang Kritik Pemerintah

Jakarta, MIMBAR - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong media massa terus bersuara dan mengkritik kebijakan pemerintah jika memang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Menurut dia hal ini demi pertumbuhan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Purbaya mengatakan, bisnis media yang saat ini surut imbas kurang lantangnya jurnalis menyuarakan kebijakan

■ Bersambung ke Hal 7



Korupsi di PT Inalum Kejati Sumut Didesak Tetapkan Tersangka

Medan, MIMBAR - Pengamat kebijakan publik sekaligus responden Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ratama Saragih, menilai Kejati Sumut tidak punya alasan untuk menunda penetapan tersangka korupsi di PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Ia menegaskan, temuan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2025, memuat indikasi kuat adanya penyimpangan kebijakan yang berpotensi merugikan negara.

■ Bersambung ke Hal 7

KPK Bakal Hadirkan Bobby di Sidang Topan Ginting

Medan, MIMBAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons sindiran Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menilai lembaga antirasuah itu takut memeriksa Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam kasus suap proyek jalan di Sumut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, meminta publik menunggu jadwal sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan. Pasalnya, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera

■ Bersambung ke Hal 7



Bank Sumut Beroperasi dalam Kegelapan Hukum

Medan, MIMBAR - Suasana Sidang Paripurna DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendadak memanas ketika Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda Perseroda Bank Sumut.

Juru bicara fraksi, H. Syahrul Efendi Siregar secara terbuka menuding bahwa Bank Sumut telah beroperasi dalam kegelapan hukum selama lima tahun terakhir. Syahrul menyebut, sejak terbitnya UU 23/2014 dan PP 54/2017, seluruh BUMD diwajibkan menyesuaikan status hukumnya paling lambat tiga tahun sejak regulasi berlaku. Namun hingga kini, Bank Sumut disebut tidak menjalankan kewajiban itu, dan malah terus beroperasi seolah tidak ada masalah hukum.

"Ini bukan sekadar kelalaian administratif. Ini kecerobohan fatal. Uang rakyat dikelola tanpa payung hukum yang sah selama lima tahun. Ini skandal yang tidak boleh dipoles-poles," tegas Syahrul dengan suara lantang di hadapan pimpinan sidang, di Gedung DPRD Sumut, Jumat (14/11).

Menurut PDIP, kondisi tersebut membuat kebijakan Bank Sumut kehilangan legitimasi kuat, mulai dari penempatan dana pemerintah kabupaten/kota hingga penyaluran kredit besar. Syahrul menyebut seluruh kebijakan itu berada dalam status tidak aman secara hukum.

"Ini menyentuh jantung kepercayaan publik. Bagaimana kita bicara stabilitas fiskal daerah kalau bank milik daerah saja berjalan tanpa kepastian hukum?" serangnya.

PDIP dengan tegas meminta Pemerintah Provinsi Sumut dan seluruh pemegang saham daerah mengakui terlebih dahulu bahwa telah terjadi pelanggaran kewajiban hukum selama bertahun-tahun sebelum berbicara soal percepatan pengesahan Ranperda Perseroda.

"Jangan buru-buru sahkan aturan baru kalau kesalahan masa lalu belum dibereskan. Rakyat harus tahu bahwa ada kelalaian besar yang dibiarkan selama lima tahun," ujar Syahrul.

Dalam pernyataannya, PDIP menuntut dilakukan audit komprehensif terhadap seluruh aktivitas Bank Sumut selama periode yang mereka sebut sebagai vacuum of legality.

Audit itu, kata PDIP, harus menelusuri seluruh kebijakan strategis, kredit jumbo, hingga kerja sama bisnis yang dijalankan dalam masa tanpa kejelasan hukum tersebut.

"Tidak boleh ada ruang gelap. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan sampai rupiah terakhir," tegasnya.

PDIP menegaskan tidak menolak

■ Bersambung ke Hal 7

Jadwal
Salat

26 JUMADIL AWAL 1447 H

Imsak	: 04:43 WIB	Ashar	: 15:36 WIB
Subuh	: 04:53 WIB	Maghrib	: 18:12 WIB
Zuhur	: 12:14 WIB	Isha	: 19:24 WIB

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah

Kasus Bobby Ujian KPK

Oleh Dr. A. Rasyid, MA

Publik Indonesia kembali dihadapkan pada ujian terhadap integritas penegakan hukum. Kali ini, sorotan tertuju pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara, yang melibatkan mantan pejabat Dinas PUPR Provinsi Sumut.

Yang menjadi pusat kontroversi bukan hanya dugaan korupsi, tetapi sikap KPK dalam menunda pemanggilan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, sebagai saksi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai KPK takut memeriksa menantu Presiden. Aksi teatrikal di depan Gedung KPK beberapa waktu lalu, dengan way-



■ Bersambung ke Hal 7

Lika-liku Pemilihan Rektor USU

Alumni Tolak Digelar di Kementerian Imipas

Medan, MIMBAR - Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara akan menggelar rapat pleno pemilihan Rektor USU periode 2026-2031 di Kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) pada 18 November 2025, pukul 10.00 WIB.

Pemilihan rektor akan diikuti tiga kandidat, yakni Muryanto Amin yang saat ini masih menjabat rektor, Poppy Anjelisa Hasibuan, dan Isfenti Sadalia.

Sekretaris MWA USU Tamrin mengklaim Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yulianto telah mengirimkan surat kepada Ketua MWA USU yang juga Menteri Imipas Agus Andrianto, berisi persetujuan rapat pleno MWA digelar pada 18 November 2025 di Kantor Kementerian Imipas.

"Surat Menteri Brian berisi persetujuan rapat diadakan di kantor Kementerian Imipas. Dalam surat tersebut Brian mengatakan sejak ia jadi menteri, pemilihan rektor tidak pernah diadakan di Kantor Menteri Pendidikan untuk menjaga netralitas. Surat Brian kepada MWA ada. Namun saya tidak diperkenankan Rektor USU Muryanto Amin memperlihatkan surat tersebut sebelum rapat pleno MWA digelar," kata Tamrin saat dihubungi pada Sabtu, 15 November 2025.

Tamrin menambahkan, 17 anggota MWA USU telah ia surati agar hadir pada saat pemili-

han rektor. Anggota MWA sudah menerima surat undangan lima hari sebelum pleno pemilihan rektor termasuk Brian Yulianto, yang juga anggota MWA USU ex-officio.

Ketua Forum Penyelamat USU Taufik Umar Dani Harahap mengatakan, tindakan MWA tersebut bertentangan dengan mandat Statuta USU yang secara eksplisit mengatur bahwa setiap proses pemilihan rektor wajib menjunjung asas akuntabilitas dan keterbukaan.

Sebagai lembaga publik yang dibiayai APBN, kata dia, USU memiliki tanggung jawab khusus untuk memastikan seluruh proses rekrutmen pimpinan dilakukan secara demokratis dan terbuka dan bukan sembunyi-sembunyi.

■ Bersambung ke Hal 7

